



KEMENTERIAN
KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA

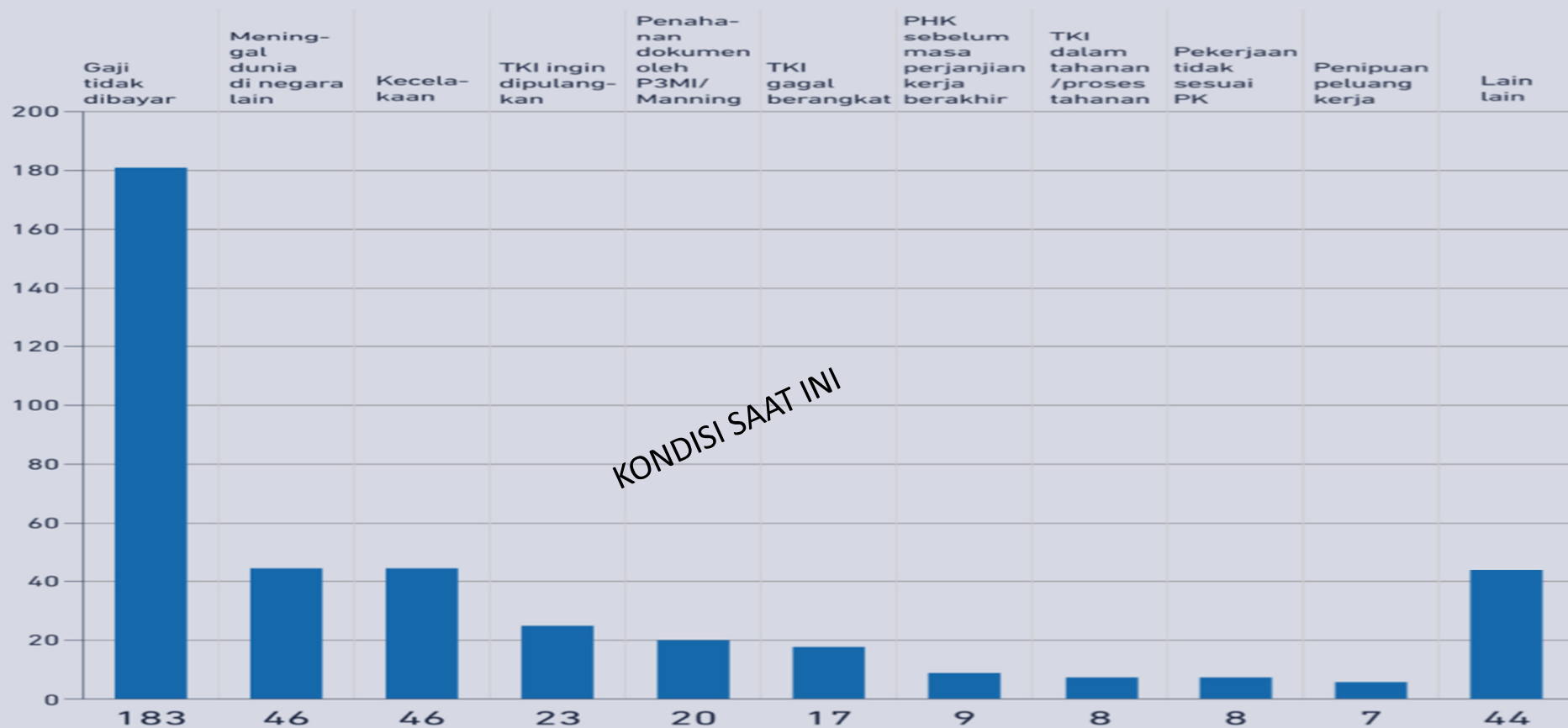
Kerja untuk Kejayaan Bangsa



Inspeksi tenaga kerja di kapal penangkap ikan di pelabuhan dan di laut: Kondisi saat ini dan Strategi masa depan

**DIREKTORAT JENDERAL PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAN
KESELAMATAN dan KESEHATAN KERJA**

Pengaduan ABK Perikanan Tahun 2018 s/d 13 Mei 2020 Berdasarkan Jenis Masalah



KONDISI SAAT INI

Sumber BP2MI 2020

DATA KASUS PEKERJA MIGRAN INDONESIA (PMI) AWAK KAPAL PERIKANAN (AKP)

NO.	TAHUN (PERIODE)	JUMLAH KASUS PMI AWAK KAPAL PERIKANAN	KETERANGAN
1.	2019	45 Kasus	Kasus Ketenagakerjaan (Gaji Tidak Dibayar)
2.	2020	532 Kasus	Kasus Ketenagakerjaan (Gaji Tidak Dibayar)
Total		577 Kasus	

Sumber: Kementerian Ketenagakerjaan

DATA AWAK KAPAL PERIKANAN DALAM NEGERI.....?

Tantangan Ketenagakerjaan di Sektor Perikanan

- ◆ Pembagian kewenangan antara Kemnaker, KKP, dan Kemhub belum jelas.
- ◆ Pendaftaran dan pemberian izin agen awak kapal penangkap ikan.
- ◆ Pendirian kantor cabang untuk agen awak kapal penangkap ikan
- ◆ Sistem dan monitoring dan pengawasan
- ◆ Perekrutan awak kapal,
- ◆ Perjanjian Kerja Pelaut, dan;
- ◆ Tanggung jawab atas hukuman.

Upaya Perbaikan Tata Kelola

- ◆ Harmonisasi dan sinkronisasi regulasi nasional
- ◆ Penguatan koordinasi dengan stakeholders terkait mengenai pembagian wewenang
- ◆ *Piloting Joint Inspection* di kapal ikan antara pengawas ketenagakerjaan, pengawas perikanan dan pengawas kelautan
- ◆ Penyusunan PP Awak Kapal guna perbaikan mekanisme penempatan dan perlindungan Awak Kapal yang bekerja di Kapal Berbendera Asing
- ◆ evaluasi atau inisiasi MoU dengan negara penempatan
- ◆ Penguatan deteksi dini, pencegahan, dan penanganan permasalahan Pekerja Migran Indonesia.
- ◆ Pembinaan dan pengawasan terhadap P3MI dan secara bersama terhadap Perusahaan yang melakukan penempatan awak kapal.

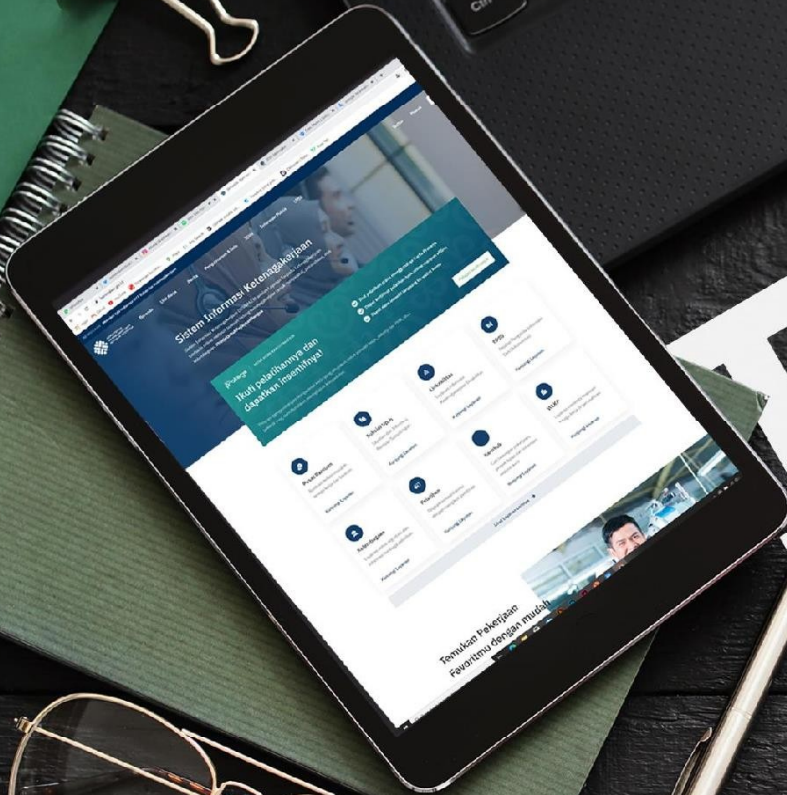
STRATEGI Roadmap PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DI SEKTOR PERIKANAN KAPAL PENANGKAP IKAN

1. Sektor perikanan sektor penting bagi Indonesia, untuk memastikan hak kerja bagi para pekerja perikanan, diperlukan peningkatan pengawasan ketenagakerjaan di sektor perikanan;
2. Awal 2018 mengembangkan diskusi dengan stakeholder (ILO KKP Kemenhub) **“panduan lapangan labour inspector fishing vessel”**; *(karakteristik yang unik)*
3. 2019 komitmen pelaksanaan pengawasan ketenagakerjaan parsial (provinsi Sulut);
4. 2021 pelaksanaan pengawasan ketenagakerjaan (provinsi Sulut);
5. 2022 pengembangan **“panduan lapangan labour inspector fishing vessel”** *(perpaduan nasional regulasi ketenagakerjaan, KKP dan C188)*
 - Diskusi terarah, mapping dengan stakeholder NZJ, Bajomulyo, Benoa
 - Kerjasama dengan Pelabuhan setempat untuk pelaksanaan pengawasan ketenagakerjaan di kapal penangkap ikan (dengan MoU → PKS)





TERIMA KASIH



Kementerian Ketenagakerjaan
Republik Indonesia



@Kemnaker RI



Kemnaker



Kementerian Ketenagakerjaan
Republik Indonesia